



**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
TAHUN 2018**

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tahun 2017 ini merupakan moment yang krusial dalam perjalanan Pemerintah Provinsi Bali. Dari sudut pandang perencanaan pembangunan yang menunjuk pada RPJMN 2015 – 2019, maka otomatis RPJMD 2013 – 2018 Provinsi Bali harus menyesuaikan dengan RPJMN 2015 – 2019 dengan prioritas nasional Nawa Citanya. Begitupun di Pemerintah Provinsi Bali untuk prioritas daerah mengikuti prioritas nasional “Nawa Cita” dengan paradigma baru “*Money Follow Program*” yaitu anggaran mengikuti program yang mana Program Prioritas Daerah mengacu pada Program Prioritas Nasional “Nawa Cita”. Maksud paradigma baru “*Money Follow Program*” sangat bagus yakni penggunaan anggaran mengacu semangat 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) tidak lagi anggaran mengikuti fungsi (Contohnya Tupoksi tiap Es.IV harus ada anggaran). Kebijakan anggaran yang bersifat “*Money Follow Program*” yaitu : 1) berorientasi manfaat untuk masyarakat, 2) berorientasi prioritas untuk mencapai tujuan dan 3) menghindari duplikasi anggaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang disebut Renstra-PD adalah dokumen yang wajib dibuat oleh PD yang berpedoman kepada RPJMN Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok :

1. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah; dan

2. Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok tersebut dilaksanakan secara berkala yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran Renstra yang telah ditetapkan PD. Rencana Kerja berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu setahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman kepada Renstra PD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja mengandung tujuan/sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan untuk dicapai. Rencana Kerja sebagai tolak ukur penilaian Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu setiap instansi pemerintah agar mempunyai Rencana Kerja yang berisi tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1).
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2018:

1. Memberikan acuan pelaksanaan anggaran terpadu dan berbasis kinerja.
2. Menjabarkan program pembangunan koperasi dan UKM kedalam kegiatan baik provinsi maupun kabupaten/kota

3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, tertib dan transparan serta akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan koperasi dan UKM Provinsi Bali.s

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja PD adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu

Bab III Tujuan dan Sasaran

Bab IV Program dan Kegiatan

Bab V Penutup

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali, No. 912 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja PD Tahun 2018 Tanggal 14 Pebruari 2017, bahwa Rencana Kerja (Renja) sebagai alat pengendali manajemen dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2013 –2018. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali memiliki Renstra 2013 – 2018 yang telah direview.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan atasan langsung yaitu Kepala Dinas dengan Bapak Gubernur, Sekretaris/Kabid kepada Kepala Dinas, Kasub Bag./Kasi kepada Sekretaris/Kabid.
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah memiliki Cascading (Pohon Kinerja)

2.1. Pelaksanaan langkah – langkah operasional Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DISPMD Provinsi Bali tahun yang lalu

1. Mengumpulkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan konsep RKA (Rencana Kerja Anggaran) untuk disetor ke Bappeda Litbang Provinsi Bali .
2. Membuat format konsep Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali untuk diinput pada aplikasi E-Planning.
3. Konsep Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai bahan Forum Konsultasi Publik dan Pra Musrenbang.
4. Konsep Renja menjadi bahan Musrenbang Provinsi
5. Memperoleh pagu sementara indikatif.
6. Mengumpulkan kembali KAK dan RKA di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sesuai pagu sementara indikatif.
7. Menyetor ke Bappeda KAK Dan RKA sesuai pagu sementara indikatif dan konsep Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
8. Menginput Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran yang sudah fixed (Tetap).

9. Dilakukan penginputan RKA oleh masing-masing admin bidang pada aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).
10. Admin SKPD mengontrol penginputan RKA dengan memperhatikan pagu dari masing-masing PPTK agar sesuai dengan RENJA.
11. Hasil penginputan RKA tersebut, dikoreksi oleh masing-masing PPTK sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. RKA yang telah dikoreksi oleh masing-masing PPTK, dikumpulkan menjadi satu dan diajukan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
13. RKA disusun menjadi satu dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan verifikasi.
14. Masing-masing PPTK menyiapkan diri untuk melaksanakan verifikasi dan menyiapkan bahan yang diperlukan.

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	sasaran	lokasi	Keterangan
1.	Program : Pelayanan administrasi Perkantoran Kegiatan :				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		Denpasar	Kegiatan ini sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan lain (bersifat rutin)
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya krbutuhan telepon, air dan listrik		Denpasar	Kegiatan ini sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan lain (bersifat rutin) Kegiatan ini untuk memperlancar program kegiatan lain
	3. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi		Denpasar	Kegiatan ini sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan lain (bersifat rutin)
	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pencetakan penggandaan dan fotocopy surat-surat dapat dilaksanakan		Denpasar	Kegiatan ini sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan lain (bersifat rutin)
	5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik		Denpasar	Kegiatan ini sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan lain (bersifat rutin)
				Denpasar	

2.	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kegiatan ini untuk menunjang kelancaran konsultasi dan koordinasi pelaksanaan program kegiatan
	7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat kordinasi dan konsultasi		Denpasar	Kegiatan ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kegiatan
	8. Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman Terlaksananya upacara agama		Denpasar	Kegiatan ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang lain (Rutin)
	9. Upacara Keagamaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan		Denpasar	Kegiatan ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang lain (Rutin)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				
	1. Pengadaan Peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor dapat disediakan Penyediaan jasa cleaning service dan kebersihan kantor		Denpasar	Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat diperlukan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor	Terpeliharanya kendaraan dinas/opersional Peralatan kantor terpelihara dengan baik		Denpasar	Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat harus ditunjang oleh tempat kerja yang layak dan memadai.
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Denpasar	Untuk menunjang program/kegiatan pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali diperlukan sarana mobilitas yang memadai
	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Perlatan kantor terpelihara dengan baik		Denpasar	Untuk memberikan pelayanan yang baik selain SDM yang andal juga harus ditunjang dengan perlatan kerja yang memadai.

3.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang kondusif 1. Penumbuhan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya sosialisasi penumbuhan wirausaha baru dan bintek peningkatan ketrampilan UMKM	UMKM	Provinsi, 9 kab/kota luar daerah	Sesuai dengan data keragaan UMKM sampai saat ini jumlah UMKM 265.558 unit dan setiap tahun terjadi penumbuhan calon wirausaha baru sedangkan jumlah anggaran terbatas sehubungan dengan hal tersebut untuk pelaksanaan kegiatan yang sama dengan sasaran peserta yang berbeda.
4.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1. Peningkatan Kemitraan usaha bagi UMKM	Terlaksananya temu kemitraan antara UMKM dengan PM/BUMN dan temu kemitraan usaha ke luar daerah	UMKM	Provinsi, 9 kab/kota luar daerah	Setiap tahun terjadi penumbuhan wirausaha tangguh dan mandiri maka pemerintah perlu memfasilitasi kemitraan usaha dari akses manajemen, produksi, pemasaran, permodalan dan pemanfaatan teknologi dengan usaha lain di luar daerah baik BUMN maupun BUMD. Menunjuk Pergub Bali nomor 36 tahun 2012 tentang penunjuk pelaksanaan Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan UMKM psl 5 ayat 1 pasal 13 ayat 1.
	2. Pengembangan jaringan Kemitraan usaha dan promosi produk unggulan koperasi	Terlaksananya promosi produk unggulan koperasi/anggota	8 Koperasi/anggota	Luar daerah	
			UMKM		

5.	3. Penyelenggaraan Promosi produk usaha mikro kecil menengah	Terlaksananya promosi produk UMKM di/ke luar daerah		Provinsi, 9 kab/kota luar daerah	Jumlah UMKM 265.558 unit perlu adanya fasilitasi akses pemasaran melalui promosi hal ini disebabkan beragamnya produk unggulan UMKM daerah dari 9 Kab/kota untuk meningkatkan PAD dan memperluas jaringan usaha.
	4. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Terlaksanya diklat bagi pengurus /pengelolaan KUKM	Koperasi dan UKM	Denpasar	Untuk meningkatkan SDM Pengelola Koperasi kualitas SDM koperasi yang masih kurang di bandingkan dengan badan usaha lainnya merupakan salah satu kendala koperasi untuk berkembang sehingga perlu difasilitasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan
	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil menengah 1. Sosialisasi Permodalan/pembiayaan dan sarana prasarana bagi koperasi.	Terlaksananya sosialisasi program perkuatan permodalan	70 Koperasi	Provinsi, 9 kab/kota	Pergub Bali No. 36 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Prov. Bali No. 3 Tahun 2012, Pergub Bali No. 15 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas pergub Bali no. 87 tahun 2008 tentang pengelolaan dana penguatan modal. Perjanjian kerjasama antara pemerintah Prov. Bali dengan PT BPD Bali tentang pengelolaan dana penguatan modal bagi usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi.

6.	2. Sosialisasi Sumber – sumber pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah	Terlaksananya sosialisasi sumber sumber pembiayaan bagi UMKM	UMKM dan Koperasi	Provinsi, 9 Kab/kota	Salah satu akses untuk memberdayakan UMKM adalah akses permodalan melalui pembiayaan baik oleh Bank, non Bank maupun oleh lembaga Keuangan Mikro. UMKM perlu mendapatkan sosialisasi sumber – sumber pembiayaan melalui akses permodalan tersebut.
	3. Forum kerjasama Daerah Mitra Praja Utama.	Terlaksananya koordinasi program FKD MPU	KUMKM	Provinsi, 9 Kab/kota Luar daerah	Kegiatan ini rutin dilaksanakan karena sudah merupakan keputusan hasil rapat teknis FKD MPU.
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya rapat koordinasi dengan Dekopinda, rapat koordinasi wilayah pembinaan kepada Dekopinda	KUMKM	Denpasar	Sebagai Wadah gerakan koperasi Dekopin adalah mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi sebagai peran utama ekonomi kerakyatan untuk itu Dekopin perlu diberdayakan untuk meneruskan dan mengembangkan kemampuan koperasi sebagai pelaku ekonomi
	2. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Terlaksananya penyusunan Buku Informasi data KUMKM	KUMKM	Provinsi 9 Kab/kota	Untuk mencapai visi, misi Dinas Koperasi UMKM perlu adanya penyajian data KUMKM yang valid dan akurat.
	3. Penguatan Jaringan Kerja sama Usaha Koperasi	Terlaksananya FGD Pengembangan KUD sebagai penunjang perekonomian Desa	Koperasi	Provinsi, 9 Kab/kota	UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 20 Tahun 2008 dan Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2012

	4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pemberdayaan KUMKM, tersedianya laporan monitoring dan evaluasi program	UMKM	Denpasar	UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pergub Bali No. 69 Tahun 2011 tentang perincian tugas pokok Dinas Koperasi UMKM pasal 8 (3 d) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Dinas secara periodic Keberadaan koperasi cukup berperan dalam ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat penting dalam pembinaan koperasi seiring dengan koperasi telah memberikan kontribusi besar terhadap aspek pembangunan untuk itu keberadaannya harus tetap dijaga agar tetap tumbuh dan berkembang dalam rangka menjaga eksistensi sekaligus memotifasi maka diberikan penghargaan koperasi yang berprestasi. UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM Perda No 3 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan UMKM Kegiatan diadakan bertujuan memperkuat kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang sehat,
	5. Pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi	Penilaian koperasi berprestasi, tokoh koperasi audisi kopsis se-Bali pemeringkatan koperasi	Koperasi	Dalam dan luar daerah	
	6. Pembekalan peningkatan mutu dan kemasan produk melalui TKPKD	Terlaksananya pembekalan peningkatan mutu dan kemasan produk melalui TKPKD	Koperasi	9 Kab/kota Provinsi Kab/kota	
	7. Revitalisasi koperasi	Jumlah koperasi yang direvitalisasi koperasi yang diawasi dan dibina pencetakan buku peraturan perkoperasian		Provinsi, 9 Kab/kota	

	8. Penilaian Kesehatan Koperasi	Penilaian kesehatan		Provinsi Kab/kota dan luar daerah	kuat ,mandiri,dan tangguh untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi social dan budaya sesuai nilai nilai dan prinsip koperasi untuk itu diperlukan peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan pada lembaga koperasi UU no 25 tahun 1992 perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha pinjam Oleh koperasi Bab. IX tentang penilaian Kesehatan Koperasi psl 31 ayat 6 dinyatakan bahwa penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap Tahun. Perda no. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan UMKM. Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan manfaat berkoperasi dikalangan anggota maupun masyarakat dan mempublikasikan perkoperasian pada masyarakat umum sehingga tumbuh kader perekonomian di bali
	9. Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Koperasi	KSP/USP Koperasi NIVO Provinsi Bali Terlaksananya sosialisasi perkoperasian pencetakan brosur, rapat koordinasi pertumbuhan koperasi	masyar akat	denpasar	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pelaku utama perekonomian daerah Bali harus mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, dengan demikian koperasi dan UKM di Provinsi Bali dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, membuka lapangan kerja serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali menetapkan Visi “Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah menuju Bali Mandara”.

Untuk mewujudkan **Visi** tersebut dan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai serta memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan dan menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan **Misi** sebagai berikut :

- a. Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat
- b. Menumbuhkan kewirausahaan koperasi dan UKM
- c. Memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UKM
- d. Meningkatkan kemitraan Koperasi dan UKM.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu disusun tujuan dan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah :

- a. Terwujudnya Koperasi yang berprestasi.
- b. Terwujudnya pertumbuhan Koperasi.
- c. Terwujudnya Koperasi dan UKM yang meningkat modal usahanya.
- d. Terwujudnya kemitraan KUKM dan SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas.

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
- b. Meningkatnya kuantitas kelembagaan koperasi.
- c. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan UKM.
- d. Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan kemitraan KUKM.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

RENJA TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Organisasi/SUB SKPD : 2.11.01.01 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.869.603.000,00			4.256.563.300,00
2.11.2.11.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				500.760.000,00			550.836.000,00
		Persentase Layanan Administrasi perkantoran yang ditangani		100%	500.760.000,00		100%	550.836.000,00
2.11.2.11.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah Dana	Denpasar		1.260.000,00			1.386.000,00
		Output : Tersedianya jasa surat menyurat		450 lembar			450 lembar	
		Outcome : Persentase jasa surat menyurat yang tertangani		100%				
2.11.2.11.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana	Denpasar		240.000.000,00			264.000.000,00
		Output : Terpenuhinya kebutuhan Telepon , air dan listrik		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		45.000.000,00			49.500.000,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi, terpenuhinya administrasi kantor		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.01.11.		Input : Jumlah Dana	Denpasar		15.000.000,00			16.500.000,00

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Pencetakan, pengandaan dan foto copy surat-surat dapat dilaksanakan		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		6.000.000,00			6.600.000,00
		Output : Tersedianya komponen listrik		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		10.000.000,00			11.000.000,00
		Output : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun			1 tahun	
		Outcome : Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Denpasar		10.000.000,00			11.000.000,00
		Output : tersedianya makanan dan minuman		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 b ulan				
2.11.2.11.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Input : Jumlah Dana	Luar daerah dan dalam daerah		98.500.000,00			108.350.000,00
		Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi		1 tahun			1 tahun	
		Outcome : Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		75.000.000,00			82.500.000,00
		Output : Terlaksananya upacara agama		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan pelaksanaan upacara agama		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.127.801.000,00			1.405.581.100,00
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditangani		100%	1.127.801.000,00		100%	1.405.581.100,00
2.11.2.11.01.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		638.784.000,00			702.662.400,00

		Output : Jumlah bulan Tersedianya Peralatan gedung		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan tersedianya biaya tenaga kontrak dan peralatan gedung kantor		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.02.177.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		15.000.000,00			16.500.000,00
		Output : peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara dengan baik		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		324.017.000,00			356.418.700,00
		Output : Penyediaan jasa cleaning service dan kebersihan kantor		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Input : Jumlah Dana	Denpasar		300.000.000,00			330.000.000,00
		Output : Terpelihara Kendaraan dinas/operasional, terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kontrak		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas		12 bulan				
2.11.2.11.01.01.17.	Program Pengembangan Pendukung Usaha Bagi Koperasi Usaha Kecil Menengah				111.000.000,00			122.100.000,00
		Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan		4,00 %	61.000.000,00		4,00 %	67.100.000,00
2.11.2.11.01.01.17.17.	Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Bagi Koperasi	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		61.000.000,00			67.100.000,00
		Output : Terlaksananya Temu konsultasi program perkuatan permodalan bagi koperasi		60 koperasi			60 koperasi	
		Outcome : Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan		50 unit				
		Persentase UKM yang mendapat pembiayaan		10,00 %	50.000.000,00		10,00 %	55.000.000,00

2.11.2.11.01.01.17.21.	Evaluasi UKM Akses Sumber Pembiayaan	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		50.000.000,00			55.000.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi Akses Sumber Pembiayaan UKM		30 unit			30 unit	
		Outcome : Jumlah UKM yang mengakses sumber pembiayaan		30 unit				
2.11.2.11.01.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				207.356.000,00			228.091.600,00
		Jumlah Peningkatan Koperasi Berprestasi		18 unit	207.356.000,00		18 unit	228.091.600,00
2.11.2.11.01.01.18.14.	Penilaian Kesehatan Koperasi	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		95.000.000,00			104.500.000,00
		Output : Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		100 koperasi			100 koperasi	
		Outcome : Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya		64 unit				
2.11.2.11.01.01.18.16.	Pemantauan dan Pengawasan Koperasi	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		56.356.000,00			61.991.600,00
		Output : Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Koperasi		15 koperasi			15 koperasi	
		Outcome : Jumlah koperasi yang diawasi		10 unit				
2.11.2.11.01.01.18.17.	Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		56.000.000,00			61.600.000,00
		Output : Terlaksananya pemeriksaan kelembagaan koperasi		50 koperasi			50 koperasi	
		Outcome : Jumlah koperasi yang meatuhi peraturan perkoperasian		50 unit				
2.11.2.11.01.01.20.	Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi				462.104.150,00			508.314.565,00
		Jumlah Peningkatan Koperasi		100	462.104.150,00		100	508.314.565,00
2.11.2.11.01.01.20.01.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		50.583.900,00			55.642.290,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Informasi Data Koperasi, Terlaksananya Pendataan Koperasi Nivo Provinsi, Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif, Terlaksananya Pendataan Kantor Cabang Koperasi Binaan		100 buku, 40 koperasi, 100 orang, 168 koperasi			100 buku, 40 koperasi, 100 orang, 168 koperasi	
		Outcome : Jumlah koperasi nivo provinsi yang datanya dimutahirkan		45 unit				

2.11.2.11.01.01.20.02.	Dukungan Penguatan Peran Dekopinwil Provinsi Bali	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		156.103.000,00			171.713.300,00
		Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Wilayah, Pembinaan Kepada Dekopinda		110 Koperasi, 110 koperasi			110 Koperasi, 110 koperasi	
		Outcome : Jumlah koperasi yang dievaluasi Dekopinwil Provinsi Bali		40 unit				
2.11.2.11.01.01.20.04.	Pemberian Penghargaan kepada koperasi yang berkinerja dengan baik	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		255.417.250,00			280.958.975,00
		Output : Terlaksananya penilaian koperasi yang berkinerja baik		18 unit			18 unit	
		Outcome : Jumlah Koperasi yang berkinerja dengan baik		18 unit				
2.11.2.11.01.01.21.	Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Usaha Kecil Menengah				1.310.581.850,00			1.441.640.035,00
		Jumlah KUKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya		70 unit	1.310.581.850,00		70 unit	1.441.640.035,00
2.11.2.11.01.01.21.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		50.000.000,00			55.000.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi Penumbuhan Wlrausaha Baru dan Bimtek Peningkatan Keterampilan UKM		70 unit			70 unit	
		Outcome : Jumlah pertumbuhan UKM		70 unit				
2.11.2.11.01.01.21.04.	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		74.550.000,00			82.005.000,00
		Output : Temu Kemitraan Koperasi dengan BUMN/BUMD/Swasta		60 Koperasi			60 Koperasi	
		Outcome : Jumlah koperasi yang bermitra		50 unit				
2.11.2.11.01.01.21.08.	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Kecil Menengah	Input : Jumlah Dana	Dalam dan luar daerah		1.050.000.000,00			1.155.000.000,00
		Output : Jumlah UKM yang melakukan pemasaran produk		6 unit			6 unit	
		Outcome : Jumlah UKM yang bermitra dan produknya dikenal		40 unit				
2.11.2.11.01.01.21.09.	Perlindungan dan Pembinaan UKM	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		50.000.000,00			55.000.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi HCPM/HKI		30 unit			30 unit	
		Outcome : Jumlah UKM yang memahami HCPM/HKI		30 unit				

2.11.2.11.01.01.21.10.	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	Input : Jumlah Dana	Provinsi Bali		86.031.850,00			94.635.035,00
		Output : Terlaksananya pemasaran produk unggulan koperasi		2 unit			2 unit	
		Outcome : Jumlah koperasi yang produknya dikenal		2 unit				
		TOTAL			3.869.603.000,00			4.256.563.300,00

Organisasi/SUB SKPD : 2.11.01.02 - UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bali

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				325.397.000,00			357.936.700,00
2.11.2.11.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				60.916.000,00			67.007.600,00
		Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang ditangani		100%	60.916.000,00		100%	67.007.600,00
2.11.2.11.01.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah Dana	Denpasar		315.000,00			346.500,00
		Output : Terlaksananya surat menyurat		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Persentase surat menyurat yang tertangani		100%				
2.11.2.11.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana	Denpasar		31.910.000,00			35.101.000,00
		Output : Terpenuhinya kebutuhan Telepon , air dan listrik		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik		12 bulan				
2.11.2.11.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		3.939.000,00			4.332.900,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		12 bulan				
2.11.2.11.01.02.01.11.		Input : Jumlah Dana	Denpasar		1.260.000,00			1.386.000,00

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Terlaksananya pencetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan		12 bulan				
2.11.2.11.01.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		2.027.000,00			2.229.700,00
		Output : Tersedianya komponen listrik		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan terpenuhinya komponen alat listrik		12 bulan				
2.11.2.11.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		840.000,00			924.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan		12 bulan				
2.11.2.11.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Denpasar		2.625.000,00			2.887.500,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 bulan				
2.11.2.11.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		18.000.000,00			19.800.000,00
		Output : Terlaksananya upacara agama		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan terlaksananya upacara keagamaan		12 bulan				
2.11.2.11.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				189.210.000,00			208.131.000,00
		Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik		100%	189.210.000,00		100%	208.131.000,00
2.11.2.11.01.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		161.685.000,00			177.853.500,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor		12 bulan				
2.11.2.11.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Input : Jumlah Dana	Denpasar		20.000.000,00			22.000.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas		12 bulan				
2.11.2.11.01.02.02.28.		Input : Jumlah Dana	Denpasar		7.525.000,00			8.277.500,00

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		12 bulan			12 bulan	
		Outcome : Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor		12 bulan				
2.11.2.11.01.02.21.	Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Usaha Kecil Menengah				75.271.000,00			82.798.100,00
		Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten		550 unit	75.271.000,00		550 unit	82.798.100,00
2.11.2.11.01.02.21.06.	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD	Input : Jumlah Dana	Denpasar		75.271.000,00			82.798.100,00
		Output : Terlaksananya Diklat bagi Pengurus/Pengelola Koperasi		50 unit			50 unit	
		Outcome : Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti diklat		50 orang				
	TOTAL				325.397.000,00			357.936.700,00

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Rencana Kerja PD Provinsi Bali merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten yang terkait dengan Tugas dan Fungsi PD.

Denpasar, 18 Juli 2017
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Bali,

I DEWA NYOMAN PATRA, SH. MH.
Pembina Utama Madya
N\IP. 19580115 198603 1 018